# SETIAP PASLON HARUS MENYATAKAN KOMITMEN INI

**Rabu, 07 Februari 2018 - Haikal Akbar**

BeritaKalteng, PALANGKA RAYA - Setiap pasangan calon (paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dan menjalankan roda Pemerintah dimasing-masing Daerah selama periode 2018 sampai dengan 2023 nantinya dapat berkomikmen untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, tidak korupsi serta memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Ombudsman RI perwakilan Kalteng (ORI Kalteng, red), Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, KPU Provinsi Kalteng, Bawaslu Provinsi Kalteng, DAD Provinsi Kalteng dan BNNP Kalteng menginisiasi, seluruh paslon yang akan berkompetisi pada ajang pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di 10 Kabupaten dan 1 Kota dapat memberikan pernyatakan komikmennya terhadap perihal diatas.

Ketua Ombudsman RI perwakilan Kalteng, Theoseng T.T Asang mengatakan, Kepala Daerah yang terpilih wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur pada UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Ketika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, maka hal itu dipastikan akan menjadi bibit terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). surat lembar komitmen ini akan dikirimkan langsung kepada masing-masing Paslon, dan penandatanganan komikmen akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2018 di Hotel Aquarius." ujar Thoeseng T.T Asang rabu (07/02).

Selain itu, Ketua DAD Provinsi Kalteng, Agustiar Sabran dalam hal ini diwakili Yuliandra Dedi salah satu unsur ketua, mengharapkan agar kepala daerah yang terpilih nantinya, dapat memperhatikan pelayanan publik kepada masyarakat adat yang berada di daerah pelosok Kalteng.

"Pada prinsifnya kami dari DAD Kalteng menyambut baik dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga kedepan bagaimana Kepala Daerah memiliki komikmen yang kuat seperti memberikan pelayanan publik yang optimal, Hak dasar masyarakat adat harus juga terpenuhi, terutama dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonominya," kata Dedi.

Disisi lain, Komisioner KPU Kalteng bidang Keuangan Umum dan Logistik, Sapta Purba mengatakan pada tahapan Pilkada 2018 ini, dapat berjalan lancar, sebagaimana dituangkan ke dalam prinsip penyelenggara Pemilu, di UU NO. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni secara garis besarnya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

"Kepala daerah yang terpilih, dapat mematuhi serta mentaati tahapan-tahapan pemilu. Baik UU maupun PERKPU RI, agar selalu dipatuhi oleh semua paslon yang akan berkompetisi pada Pilkada 2018. Harapan saya, kepala daerah yang terpilih dapat dihasilkan melalui sebuah proses pemilu yang berkualitas," ujar Sapta Purba.

Ditambahkan Eko Wahyu Sulistiobudi mewakili Bawaslu Kalteng menuturkan, pengawasan terhadap tim pemenangan paslon tetap dilakukan oleh Panwaslu setempat. Karena, Bawaslu Kalteng selalu berkoordinasi dengan Panwaslu setempat, mengawasi proses Pilkada 2018 serentak, di Kalteng.

"Terutama, pada masa kampanye sampai pada penetapan akhir kepala daerah terpilih. Setiap paslon, berkewajiban ikut serta menjaga situasi kondisi dan keamanan, mulai dari penetapan nomor urut paslon, masa kampanye dan penetapan akhir. Sampai pada tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi," jelas Eko.

Ditempat yang sama, Kabid Rehabilitasi BNNP Kalteng, Dorce Sanda menyampaikan, sekarang narkoba tidak hanya merusak masyarakat lapisan kelas bawah, tapi juga telah menyentuh kalangan pejabat, termasuk pula kepala daerah. Di sejumlah daerah, ada beberapa pejabat yang telah tersandung masalah narkoba.

"Kita berharap, hal ini tidak terjadi dengan kepala daerah di Kalteng. Ketika para kepala daerah di Kalteng tidak bersentuhan dengan narkoba, maka dipastikan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, hingga akhirnya dapat memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat. Namun sebaliknya, jika ada kepala daerah yang sampai bersentuhan dengan narkoba, maka dipastikan penyelenggaraan pemerintahan pun akan ikut terganggu yang akhirnya, akan sangat berpengaruh pada buruknya pelayanan publik," kata Dorce.

Sementara itu, Ketua Pelaksana UPP Saber Pungli Kalteng Kombes Pol Benone, dalam kesempatan ini diwakili oleh Kompol Marcelino, dirinya menegaskan agar kepala daerah yang terpilih, dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan, agar dapat terhindari dari tindak pidana korupsi.

"Kunci terjadinya tindak pidana korupsi, ada di kepala daerahnya. Jika kepala daerahnya tidak terjerat korupsi, maka pemerintah di daerah pun, dipastikan tidak akan berbuat hal yang sama. Jadi integritas, dari kepala daerahnya sangat memegang peranan penting, karena kepala daerah merupakan panutan untuk bawahannya," ungkap Marcelino.

Dia juga mengatakan, tim saber pungli juga berkoordinasi dengan pihak Bawaslu dan Panwaslu se Kalteng. Pada saat pemilu, hal yang paling rentan adalah pada praktik 'money politik' (politik uang, red). Jika sampai ditemukan, maka dipastikan tim saber pungli akan mengambil tindakan.

Hal senada disampaikan salah satu Koordinator Kejati Kalteng, Amrizal mengutarakan, setiap paslon harus menjunjung tinggi komitmen yang telah ditandatangani. Upaya yang dilakukan oleh tim saber pungli, selain penindakan juga melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Gagasan yang diprakasai oleh ORI perwakilan Kalteng ini, sangat baik dan kami sangat mendukung akan hal tersebut.

"Harapan kedepannya, setiap kepala daerah yang telah terpilih dan ditetapkan, dapat patuh dan memegang poin-poin komitmen yang telah ditandatanganinya. Dengan demikian, maka kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik, hasil dari proses pemilu yang berkualitas," pungkasnya.(dhy/Aa)